

Jejaring Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Strategi Pengelolaan Ekowisata di Kota Tasikmalaya

Riki Satia Muharam¹, Budiman Rusli²

¹Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

e-mail: ¹r.satia.muharam@unpad.ac.id, ²budiman.rusli@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan melalui jejaring kebijakan yang efektif. Kota Tasikmalaya memiliki potensi ekowisata yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya, seperti keterbatasan infrastruktur, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan ekowisata. Penelitian ini menganalisis peran jejaring kebijakan dalam mendukung pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Kota Tasikmalaya dengan menyoroti sinergi antara pemerintah, industri pariwisata, akademisi, dan masyarakat lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi pemerintah, program desa wisata, serta kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan ekowisata. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan, seperti tumpang tindih regulasi dan minimnya dukungan terhadap inovasi ekowisata berbasis konservasi. Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat jejaring kebijakan mencakup perbaikan regulasi berbasis partisipasi, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dalam monitoring dan evaluasi kebijakan ekowisata. Dengan strategi yang tepat, Kota Tasikmalaya dapat mengoptimalkan pengelolaan ekowisata yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya.

Kata Kunci :

Jejaring Kebijakan; Ekowisata, Kota Tasikmalaya; Pariwisata Berkelanjutan; Strategi Pengelolaan

ABSTRACT

Sustainable ecotourism management requires the involvement of various stakeholders through an effective policy network. The city of Tasikmalaya has significant ecotourism potential but still faces several management challenges, such as limited infrastructure, lack of coordination between institutions, and insufficient community participation in ecotourism policies. This study analyzes the role of policy networks in supporting sustainable ecotourism management in Tasikmalaya by highlighting the synergy between the government, the tourism industry, academics, and local communities. The analysis results indicate that government regulations, village tourism programs, and partnerships with the private sector and communities significantly impact ecotourism sustainability. However, challenges remain in policy implementation, such as overlapping regulations and a lack of support for conservation-based ecotourism innovation. Therefore, strategies that can be implemented to strengthen policy networks include participatory regulation improvement, enhanced cross-sector collaboration, and the utilization of technology for ecotourism policy monitoring and evaluation. With the right strategies, Tasikmalaya can optimize ecotourism management that not only enhances local economic welfare but also preserves environmental and cultural sustainability.

Keywords :

Policy Network; Ecotourism; Tasikmalaya City; Sustainable Tourism; Management Strategy

A. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong investasi di berbagai sektor terkait (UNWTO, 2018). Ekowisata, sebagai bagian dari pariwisata berkelanjutan, menawarkan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan keseimbangan antara konservasi alam, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengalaman wisata yang berkualitas (Weaver, 2006).

Dalam konteks pembangunan daerah, ekowisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan budaya setempat (Bramwell & Lane, 2011). Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata mampu mengurangi dampak negatif dari eksplorasi

sumber daya alam, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi (Suansri, 2003). Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur pengembangan ekowisata harus dirancang secara holistik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam suatu jejaring kebijakan yang efektif (Hall, 2019).

Di Kota Tasikmalaya, potensi ekowisata cukup besar dengan keberadaan berbagai destinasi berbasis alam dan budaya yang memiliki nilai ekologi tinggi (Tasikmalaya Tourism Office, 2022). Namun, tantangan dalam pengelolaannya masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur, koordinasi kebijakan yang belum optimal, serta kurangnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal (Kemenparekraf RI, 2021).

Kota Tasikmalaya memiliki potensi ekowisata yang kaya dengan berbagai destinasi berbasis alam

dan budaya yang masih terjaga kelestariannya. Salah satu daya tarik utamanya adalah kawasan perbukitan yang menawarkan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, seperti di sekitar Gunung Galunggung. Selain menjadi destinasi wisata favorit, kawasan ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna (Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2022). Selain itu, keberadaan hutan lindung di wilayah Tasikmalaya semakin memperkuat potensi ekowisatanya. Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai area konservasi, tetapi juga menjadi pusat edukasi bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang keanekaragaman hayati dan pentingnya pelestarian lingkungan (Weaver, 2006).

Selain potensi alamnya, Kota Tasikmalaya juga memiliki wisata berbasis kearifan lokal yang unik, seperti Kampung Naga. Kampung ini mempertahankan adat istiadat leluhur dengan arsitektur rumah tradisional, sistem pertanian organik, serta kehidupan masyarakat yang harmonis dengan alam. Keberlanjutan pariwisata berbasis budaya ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman autentik tentang kehidupan masyarakat tradisional Sunda (Suansri, 2003). Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan ekowisata di Tasikmalaya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai dan belum optimalnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat lokal.

Pengelolaan ekowisata menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam aspek kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta keseimbangan antara konservasi dan ekonomi. Dari sisi kebijakan, sering kali terdapat ketidakseimbangan antara regulasi nasional dan implementasi di tingkat daerah. Kebijakan yang kurang sinkron dapat menghambat pengelolaan ekowisata yang efektif, terutama dalam hal perizinan, zonasi kawasan wisata, serta standar keberlanjutan yang harus diterapkan (Hall, 2019). Selain itu, koordinasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha wisata masih menjadi kendala utama dalam ekowisata. Keterlibatan pemangku kepentingan sering kali terbatas akibat kurangnya komunikasi yang efektif, minimnya kapasitas pengelolaan di tingkat komunitas, serta adanya kepentingan ekonomi yang dominan dari sektor swasta yang dapat mengabaikan prinsip konservasi (Bramwell & Lane, 2011).

Di sisi lain, ekowisata juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara konservasi dan ekonomi. Meskipun ekowisata bertujuan untuk melestarikan lingkungan, tekanan ekonomi dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, terutama jika tidak ada regulasi ketat terhadap jumlah wisatawan dan aktivitas wisata yang berpotensi merusak ekosistem (Weaver, 2006). Banyak destinasi ekowisata mengalami degradasi lingkungan akibat overtourism dan kurangnya

kesadaran wisatawan terhadap pentingnya konservasi (Buckley, 2011). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis jejaring kebijakan yang mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai pihak, dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dari pariwisata dengan perlindungan ekosistem jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, ekowisata dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Suansri, 2003).

Pengelolaan ekowisata di Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi untuk mencapai keberlanjutan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi kendala utama, terutama di destinasi seperti Kawah Karaha Bodas dan Gunung Galunggung yang masih sulit dijangkau akibat buruknya kondisi jalan dan minimnya transportasi umum. Selain itu, laporan dari BPS Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih kurang optimal, dengan tumpang tindih kebijakan antara Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah desa yang menghambat efektivitas program ekowisata. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata juga masih rendah, dengan hanya sekitar 30% pelaku usaha wisata yang mendapatkan pelatihan terkait ekowisata, sementara akses terhadap modal usaha masih terbatas. Dari aspek lingkungan, studi dari KLHK (2023) menunjukkan bahwa 60% kawasan ekowisata di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan volume sampah akibat kurangnya fasilitas pengelolaan limbah dan rendahnya kesadaran wisatawan. Inovasi dalam pengembangan produk wisata juga masih terbatas, dengan sebagian besar destinasi hanya menawarkan konsep wisata alam konvensional tanpa pemanfaatan teknologi digital yang optimal. Selain itu, data dari BMKG mengonfirmasi bahwa kunjungan wisatawan sangat dipengaruhi oleh musim, di mana jumlah wisatawan turun hingga 40% pada musim hujan karena kondisi medan yang sulit dan berbahaya. Evaluasi dan monitoring kebijakan juga masih menjadi tantangan, dengan kurangnya sistem pengawasan dampak lingkungan serta data yang belum terintegrasi untuk mengukur kontribusi ekowisata terhadap ekonomi lokal.

Jejaring kebijakan memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai regulator yang menetapkan kebijakan, regulasi, serta insentif yang mendukung praktik pariwisata berkelanjutan, termasuk pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan (Hall, 2019). Sementara itu, pelaku usaha memegang peran

penting dalam implementasi kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekowisata dalam operasional bisnis mereka, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui kemitraan usaha (Bramwell & Lane, 2011).

Jejaring kebijakan dalam konteks penelitian ini merujuk pada sistem interaksi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri pariwisata, akademisi, dan masyarakat lokal, dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan ekowisata berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya keterhubungan antar aktor dalam berbagi sumber daya, informasi, dan tanggung jawab guna mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan ekowisata yang ramah lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta mempertahankan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Jejaring kebijakan tidak hanya terbatas pada hubungan formal dalam bentuk regulasi dan kebijakan publik, tetapi juga mencakup mekanisme informal seperti kemitraan, forum diskusi, dan koordinasi lintas sektor yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk bekerja sama secara sinergis. Dalam konteks ekowisata di Kota Tasikmalaya, jejaring kebijakan berperan dalam menyalaraskan kepentingan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi, sehingga dapat menciptakan model pengelolaan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, masyarakat lokal sebagai pemilik budaya dan penjaga lingkungan memiliki peran kunci dalam memastikan keberlanjutan ekowisata. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi serta memberikan manfaat ekonomi secara langsung melalui usaha berbasis komunitas (Suansri, 2003). Akademisi juga turut berkontribusi dengan menyediakan riset dan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam jejaring kebijakan ini dapat menciptakan ekosistem ekowisata yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dapat berjalan seimbang (Buckley, 2011). Dengan adanya jejaring kebijakan yang kuat dan terintegrasi, pengelolaan ekowisata dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan serta menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan (Weaver, 2006).

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana peran jejaring kebijakan dalam mengoptimalkan pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Kota Tasikmalaya, terutama dalam hal koordinasi, regulasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Kedua, strategi apa yang dapat diterapkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat

dalam mendukung keberlanjutan ekowisata, baik dalam aspek pengelolaan, investasi, maupun pemberdayaan masyarakat. Ketiga, bagaimana dampak kebijakan ekowisata yang telah diterapkan terhadap keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Tasikmalaya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana peran jejaring kebijakan dalam mendukung pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Kota Tasikmalaya?

Kota Tasikmalaya memiliki berbagai destinasi ekowisata yang kaya akan nilai ekologis, budaya, dan ekonomi. Beberapa destinasi unggulan meliputi:

1. Kawah Karaha Bodas: Kawasan ini merupakan destinasi geotermal dengan pemandangan kawah putih dan sumber air panas alami yang menarik wisatawan. Selain potensinya sebagai daya tarik wisata, Karaha Bodas juga menjadi area konservasi yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan agar tidak mengalami degradasi lingkungan.
2. Gunung Galunggung: Salah satu ikon wisata alam di Tasikmalaya, Gunung Galunggung menawarkan keindahan pemandangan kawah, air terjun, dan hutan pinus yang sering dijadikan destinasi wisata petualangan serta penelitian geologi. Pengelolaan kawasan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung wisata. Gunung Galunggung, dengan ketinggian 2.168 meter di atas permukaan laut, terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Destinasi ini menawarkan berbagai daya tarik wisata, termasuk pendakian ke puncak melalui 620 anak tangga dan pemandian air panas (Cipanas) yang dilengkapi dengan kolam renang serta bak rendam air panas. Rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Gunung Galunggung berjumlah 213.382 orang per tahun, dengan mayoritas merupakan wisatawan lokal, sementara wisatawan mancanegara masih di bawah 100 orang per tahun
3. Kampung Naga: Sebagai destinasi wisata budaya dan ekowisata, Kampung Naga mempertahankan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari warganya yang masih berpegang pada tradisi adat dan keseimbangan dengan alam. Konsep pariwisata berbasis masyarakat di sini memberikan pengalaman unik bagi wisatawan dan sekaligus menjadi contoh praktik konservasi budaya dan lingkungan.

Ekowisata di Kota Tasikmalaya berperan penting dalam mendukung ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Misalnya, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta jasa pemandu wisata mendapat manfaat

langsung dari meningkatnya jumlah wisatawan. Selain itu, ekowisata juga mendorong investasi dalam sektor pariwisata, baik dari pemerintah maupun swasta, yang berdampak pada pembangunan fasilitas pendukung wisata.

Dari aspek lingkungan, konsep ekowisata mendorong praktik konservasi dan edukasi bagi masyarakat dan wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Dengan pendekatan yang tepat, kawasan wisata dapat dijaga agar tetap asri, tidak mengalami eksplorasi berlebihan, serta tetap mempertahankan nilai ekologisnya.

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan ekowisata di Kota Tasikmalaya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Beberapa destinasi wisata di Tasikmalaya masih menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas, seperti jalan yang kurang memadai, minimnya transportasi umum menuju lokasi wisata, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet, dan pusat informasi wisata. Hal ini berdampak pada kenyamanan wisatawan dan dapat menghambat perkembangan ekowisata di daerah tersebut.

2. Koordinasi Kebijakan Antar Lembaga Pemerintah Pengelolaan ekowisata memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah desa dan masyarakat lokal. Namun, sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan atau kurangnya sinergi dalam implementasi program pengelolaan destinasi wisata. Misalnya, kebijakan pembangunan wisata yang tidak selaras dengan prinsip konservasi lingkungan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemangku kepentingan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Keberhasilan ekowisata sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pariwisata. Padahal, tanpa keterlibatan aktif masyarakat, upaya pelestarian lingkungan dan budaya di kawasan wisata akan sulit terwujud. Masyarakat sering kali hanya menjadi objek wisata, bukan sebagai aktor utama yang berkontribusi dalam pengelolaan destinasi.

Kota Tasikmalaya memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata dengan berbagai destinasi alam dan budaya yang menarik. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya koordinasi kebijakan, dan minimnya partisipasi masyarakat harus segera diatasi agar ekowisata dapat berkembang secara berkelanjutan.

Diperlukan strategi berbasis jejaring kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengelolaan ekowisata di Tasikmalaya.

Pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan memerlukan koordinasi yang baik antar berbagai pemangku kepentingan. Jejaring kebijakan menjadi pendekatan yang efektif dalam menghubungkan berbagai pihak seperti pemerintah, industri pariwisata, akademisi, dan masyarakat lokal dalam menciptakan strategi yang mendukung keberlanjutan ekowisata. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam merancang kebijakan yang memastikan pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Melalui regulasi yang berbasis konservasi dan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat menyediakan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip ekowisata, meningkatkan infrastruktur, serta membangun sinergi antar lembaga dalam pengelolaan ekowisata yang efektif. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah tumpang tindih kebijakan antar sektor serta keterbatasan anggaran.

Industri pariwisata memiliki peran penting dalam investasi dan inovasi ekowisata melalui pembangunan fasilitas ramah lingkungan, penerapan teknologi hijau, serta pengembangan paket wisata berbasis pengalaman yang melibatkan masyarakat lokal. Meskipun demikian, keterlibatan sektor swasta masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Selain itu, akademisi turut berperan dalam menyediakan kajian ilmiah sebagai dasar perumusan kebijakan ekowisata. Penelitian yang dilakukan dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi dan risiko ekowisata, menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti, serta mengembangkan metode pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Masyarakat lokal merupakan pemangku kepentingan utama dalam keberlanjutan ekowisata. Tanpa keterlibatan mereka, pengelolaan ekowisata akan sulit berhasil. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan, serta keterlibatan dalam program konservasi lingkungan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata secara profesional serta kurangnya akses terhadap modal usaha, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta.

Jejaring kebijakan dalam pengelolaan ekowisata di Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam menciptakan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Namun, efektivitas jejaring ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dianalisis secara kritis. Secara umum, jejaring kebijakan yang telah ada memungkinkan adanya koordinasi lintas sektor, tetapi

implementasinya sering kali tidak optimal akibat tumpang tindih regulasi dan kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, serta masyarakat lokal. Misalnya, kebijakan zonasi ekowisata yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata sering kali tidak sejalan dengan kebijakan konservasi lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata seperti Kawah Karaha Bodas dan Gunung Galunggung.

Hambatan lain yang dihadapi mencakup minimnya kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan jejaring kebijakan yang ada, rendahnya partisipasi sektor swasta dalam investasi ekowisata, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat yang kurang optimal sering disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan dan minimnya pelatihan dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas. Sementara itu, sektor swasta cenderung kurang berinvestasi karena belum adanya insentif yang menarik dari pemerintah untuk mengembangkan ekowisata secara berkelanjutan. Selain itu, belum adanya sistem evaluasi yang berbasis data menyebabkan sulitnya mengukur dampak kebijakan yang telah diterapkan terhadap keberlanjutan ekowisata.

Untuk mengoptimalkan jejaring kebijakan, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan koordinasi antarinstansi melalui forum reguler yang melibatkan pemangku kepentingan utama agar kebijakan yang diterapkan lebih terintegrasi. Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat melalui program edukasi dan pelatihan berbasis kebutuhan lokal agar mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan wisata. Ketiga, insentif bagi sektor swasta untuk mendorong investasi berkelanjutan dalam ekowisata, misalnya melalui kebijakan pajak atau kemudahan perizinan bagi usaha berbasis lingkungan. Keempat, penerapan teknologi dalam monitoring dan evaluasi kebijakan, seperti penggunaan sistem informasi geospasial (SIG) untuk memantau dampak ekowisata terhadap lingkungan. Dengan strategi ini, jejaring kebijakan diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mendukung pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.

Untuk memahami penerapan jejaring kebijakan secara optimal, dapat dilakukan perbandingan dengan daerah lain yang telah berhasil mengembangkan ekowisata berbasis jejaring kebijakan. Studi kasus seperti Desa Penglipuran di Bali, Taman Nasional Gunung Rinjani di NTB, serta Ekowisata Dieng di Jawa Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan ekowisata memerlukan kolaborasi erat antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dari berbagai studi kasus tersebut, Kota Tasikmalaya dapat mengambil pelajaran dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan guna mengoptimalkan jejaring kebijakan

dalam pengelolaan ekowisata. Dengan demikian, jejaring kebijakan memainkan peran kunci dalam memastikan ekowisata di Kota Tasikmalaya berkembang secara berkelanjutan, menggabungkan aspek konservasi lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata?

Pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ekowisata masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan sinergi yang optimal (Bramwell & Lane, 2011). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata.

Pemerintah memiliki peran utama sebagai regulator dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekowisata. Kebijakan berbasis partisipasi dapat memberikan ruang bagi industri dan masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan wisata. Selain itu, harmonisasi regulasi antar sektor juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih aturan yang dapat menghambat perkembangan ekowisata (Hall, 2019). Pemerintah dapat memberikan insentif kepada sektor swasta yang mengembangkan wisata berbasis lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal, seperti pengurangan pajak atau subsidi usaha bagi desa wisata.

Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta (Public-Private Partnership/PPP) dapat menjadi strategi efektif dalam mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan. Model ini memungkinkan pemerintah untuk bekerja sama dengan industri pariwisata dalam membangun infrastruktur, fasilitas, serta menciptakan inovasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Contoh keberhasilan PPP dalam ekowisata dapat ditemukan di berbagai daerah, seperti pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani yang melibatkan swasta dalam pengelolaan wisata pendakian dengan tetap memperhatikan aspek konservasi (Putri et al., 2020).

Selain itu, masyarakat lokal merupakan bagian penting dalam ekowisata karena mereka adalah pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam bidang pengelolaan wisata sangat diperlukan. Pemerintah dan industri pariwisata dapat menyelenggarakan program pelatihan keterampilan dalam bidang hospitality, konservasi, dan kewirausahaan wisata. Pembentukan kelompok

sadar wisata (Pokdarwis) juga menjadi strategi efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas (Scheyvens, 2002).

Teknologi juga memainkan peran penting dalam memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekowisata. Penggunaan platform digital dapat meningkatkan pemasaran destinasi wisata serta memudahkan wisatawan dalam mengakses informasi tentang lokasi wisata yang berbasis ekowisata. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan wisata, seperti sistem pemantauan berbasis sensor untuk mengukur dampak wisata terhadap ekosistem (Gossling, 2017).

Kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap pentingnya pelestarian lingkungan menjadi kunci dalam pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Pemerintah, akademisi, dan industri pariwisata dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan kampanye edukasi tentang pentingnya konservasi alam dan budaya lokal. Program ekowisata berbasis pendidikan yang melibatkan sekolah dan universitas juga dapat membantu dalam menciptakan wisatawan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (Weaver, 2006).

Strategi kolaborasi yang telah diterapkan perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung keberlanjutan ekowisata. Studi kasus dari daerah lain yang telah berhasil dalam mengelola ekowisata berbasis kolaborasi dapat menjadi referensi untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diterapkan di Kota Tasikmalaya. Indikator keberhasilan seperti peningkatan jumlah wisatawan berkelanjutan, peningkatan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan dapat digunakan sebagai ukuran efektivitas strategi yang diterapkan (Buckley, 2012).

Kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam memastikan ekowisata yang berkelanjutan. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator, industri pariwisata sebagai investor dan inovator, serta masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan wisata berbasis komunitas. Berbagai strategi seperti penguatan regulasi, kemitraan publik-swasta, peningkatan kapasitas masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta edukasi dan evaluasi dampak dapat diterapkan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan ekowisata. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis kolaborasi, ekowisata di Kota Tasikmalaya dapat berkembang secara optimal, memberikan manfaat ekonomi, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Untuk memastikan efektivitas jejaring kebijakan dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Kota Tasikmalaya, diperlukan strategi yang lebih spesifik dan terukur. Peningkatan koordinasi antar lembaga dapat dilakukan dengan membentuk Forum

Koordinasi Ekowisata yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta menyelaraskan kebijakan dalam jangka waktu satu hingga dua tahun. Penguatan kapasitas masyarakat menjadi aspek penting melalui pelatihan reguler bagi minimal 500 peserta per tahun dalam bidang pemanduan wisata, pengelolaan homestay, dan konservasi lingkungan, serta penyediaan akses permodalan dan insentif usaha bagi UMKM berbasis ekowisata. Insentif bagi sektor swasta dapat diberikan melalui pengurangan pajak dan skema public-private partnership (PPP) untuk mendorong investasi berkelanjutan. Selain itu, peningkatan infrastruktur pendukung seperti perbaikan jalan menuju destinasi wisata serta penyediaan fasilitas umum yang memadai harus menjadi prioritas. Implementasi teknologi dalam monitoring dan evaluasi juga perlu diterapkan, seperti pengembangan sistem informasi berbasis GIS untuk pemantauan dampak lingkungan dan penggunaan big data analytics dalam mengukur tren wisatawan serta dampaknya terhadap ekonomi lokal. Dengan strategi ini, pengelolaan ekowisata di Kota Tasikmalaya dapat lebih terarah, seimbang antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Bagaimana dampak kebijakan yang telah diterapkan terhadap keberlanjutan ekowisata di Kota Tasikmalaya?

Kota Tasikmalaya telah menerapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan ekowisata guna memastikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan tersebut meliputi regulasi pemerintah, program pendukung ekowisata, serta kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat. Regulasi pemerintah seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang ekowisata bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata. Kebijakan konservasi dan zonasi wisata diterapkan untuk mencegah eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan serta memastikan bahwa aktivitas wisata tidak merusak ekosistem yang ada. Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai program untuk mendukung ekowisata, seperti program desa wisata yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan konsep wisata berbasis komunitas, serta pemberian insentif bagi usaha ekowisata yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Dalam implementasinya, pemerintah juga menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan fasilitas wisata berkelanjutan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata serta konservasi lingkungan.

Dampak kebijakan yang telah diterapkan dalam pengelolaan ekowisata di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial, dengan data empiris sebagai pendukung. Dari sisi ekonomi, berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya, jumlah

kunjungan wisata ke destinasi ekowisata seperti Gunung Galunggung dan Kawah Karaha Bodas meningkat sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir, yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sebesar Rp5 miliar per tahun. Selain itu, program pengembangan desa wisata di sekitar destinasi telah meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil berbasis ekowisata hingga 30%, menciptakan lebih dari 200 lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Dari sisi lingkungan, penerapan kebijakan zonasi wisata dan pengelolaan limbah oleh pemerintah daerah telah membantu mengurangi volume sampah di area wisata sebesar 25% sejak tahun 2020, meskipun masih terdapat tantangan dalam pengawasan dan penegakan aturan. Sementara itu, dampak sosial kebijakan ekowisata terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, seperti pelatihan pemandu wisata dan konservasi lingkungan, dengan lebih dari 500 warga mengikuti pelatihan sejak tahun 2021. Namun, masih terdapat kendala dalam hal sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan desa wisata, serta keterbatasan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pendukung. Dengan adanya data ini, dapat terlihat bahwa kebijakan yang diterapkan telah memberikan dampak positif, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutannya.

Meskipun kebijakan ekowisata telah memberikan dampak positif, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah sering kali menyebabkan tumpang tindih kebijakan, sementara rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Evaluasi kebijakan melalui studi kasus daerah lain yang telah berhasil menerapkan model ekowisata berkelanjutan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki implementasi kebijakan di Kota Tasikmalaya. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan beberapa strategi seperti penyusunan regulasi yang lebih spesifik dan berbasis keberlanjutan, penguatan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam monitoring dan evaluasi ekowisata. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan ekowisata di Kota Tasikmalaya diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat lokal.

C. SIMPULAN

Jejaring kebijakan memainkan peran penting dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Kota Tasikmalaya dengan melibatkan pemerintah, industri pariwisata, akademisi, dan masyarakat lokal. Kebijakan yang diterapkan, seperti program desa wisata dan regulasi zonasi, telah berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal, pertumbuhan UMKM berbasis wisata, serta penciptaan lapangan

kerja. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan yang masih lemah perlu segera diatasi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi kebijakan yang lebih efektif serta pemanfaatan teknologi dalam monitoring dan evaluasi ekowisata. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi model jejaring kebijakan yang lebih adaptif serta strategi inovatif dalam mengoptimalkan ekowisata berbasis keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. (2023). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023. Tasikmalaya: BPS Kota Tasikmalaya.
- Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. (2023). Statistik Pariwisata Kota Tasikmalaya 2022-2023. Tasikmalaya: BPS Kota Tasikmalaya.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 411-421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.576796>
- Buckley, R. (2011). Tourism and environment. *Annual Review of Environment and Resources*, 36(1), 397-416. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-041210-132637>
- Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 528-546.
- Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya. (2022). Laporan Pengembangan Destinasi Ekowisata di Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya: Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya.
- Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya. (2023). Laporan Statistik Pariwisata Kota Tasikmalaya 2020-2023. Tasikmalaya: Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya.
- Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya. (2023). Laporan Tahunan Pengelolaan Destinasi Ekowisata Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya: Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya.
- Gossling, S. (2017). Tourism, information technologies and sustainability: An exploratory review. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(7), 1024-1041.
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and the contemporary political economy of tourism. *Tourism Planning & Development*, 16(3), 398-414. <https://doi.org/10.1080/21568316.2018.1501736>
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and the global sustainable tourism criteria. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1044-1060.

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Kompas. (2023). Kawah Karaha Bodas di Tasikmalaya: Daya Tarik, Aktivitas, dan Rute. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://bandung.kompas.com>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.
- Prasetyo, H. (2020). "Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Kampung Naga, Tasikmalaya." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(1), 77-90.
- Putri, R. N., Wibowo, A., & Susanti, N. (2020). Public-private partnerships in ecotourism development: A case study of Mount Rinjani National Park. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 1(2), 89-102.
- Roby Geographer. (2014). Makalah Gunung Galunggung dan Kampung Naga. SlideShare. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://www.slideshare.net>.
- Scheyvens, R. (2002). *Tourism for development: Empowering communities*. Prentice Hall.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour - REST.
- Susanti, R., & Nugraha, D. (2021). "Analisis Dampak Ekowisata terhadap Perekonomian Lokal di Kawasan Gunung Galunggung." *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 8(2), 112-125.
- Tasikmalaya Tourism Office. (2022). Laporan Pengembangan Destinasi Ekowisata di Kota Tasikmalaya. Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya.
- UNWTO (World Tourism Organization). (2018). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030*. Madrid: UNWTO.
- Weaver, D. B. (2006). *Sustainable Tourism: Theory and Practice*. London: Routledge.
- Wikipedia. (2025). Gunung Galunggung. Diakses pada 12 Maret 2025, dari <https://id.wikipedia.org>.
- .